

PIKIRAN RAKYAT 13 DESEMBER 2018

Bupati Cianjur Ditangkap, Kakak Ipar Buron

Terjerat Dana Alokasi Khusus

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Cianjur Rivano Muchtar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan sebesar Rp 1,556 miliar yang diperuntukan bagi 140 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Cianjur. Sementara, Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar sang bupati, kini berstatus buron. Ia diketahui telah menjalankan peran sebagai makelar proyek sejak masa pemerintahan Bupati Tjetjep Muchtar Soleh (2006-2016).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers Rabu (12/12/2018) malam mengatakan bahwa Irvan memotong DAK pendidikan Kabupaten Cianjur sebesar 14,5% dari total anggaran Rp 46,8 miliar. Total sebanyak 200 SMP yang mengajukan DAK, tetapi yang disetujui hanya 140 sekolah. Dari potongan sebesar 14,5% itu, Irvan diduga menerima *fee* sebesar 7%.

“KPK menemukan setidaknya 14,5% anggaran DAK seharusnya digunakan oleh 140 SMP untuk membangun fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, atau fasilitas lain. Tapi, dana itu justru dipangkas sejak awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,”katanya didampingi oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Ia mengungkapkan, Bupati Cianjur itu terjaring operasi tangkap tangan yang digelar tim KPK. Selain Irvan, tim KPK juga mengamankan enam orang lainnya. Mereka adalah Cecep Sobandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur), Rosidin (Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur), Rudiansyah (Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Cianjur), Taufik Setiawan (Bendahara MKKS Kabupaten Cianjur), Budiman (salah seorang kepala seksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur), dan seorang sopir berinisial D.

Basaria mengatakan, pada Rabu (12/12/2018) pukul 05.00, KPK mendeteksi terjadinya perpindahan uang yang telah dikemas dalam kardus cokelat dari mobil Rosidin (yang dibawa sopir) ke mobil Cecep. Tim KPK mengetahui bahwa uang itu sebelumnya dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Kabupaten Cianjur.

“Tim KPK mengamankan dua orang, yakni CS (Cecep Sobandi) dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur. Setelah itu, pada pukul 05.17, tim mengamankan ROS (Rosidin) di rumahnya. Sekitar pukul 5.37, tim bergerak ke rumah pribadi T (Taufik Setiawan) dan R (Rudiansyah) lalu mengamankan mereka,” tuturnya.

Pada pukul 6.30, tim memasuki Pendopo Kabupaten Cianjur dan mengamankan Irvan di rumah dinas. Selanjutnya tim mengamankan Budiman di sebuah hotel di Cipanas pada pukul 12.05. “Enam orang pertama dibawa langsung dan tiba di kantor KPK pukul 10.30 untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sementara B (Budiman) dibawa terpisah dan kini telah diperiksa KPK,” ucapnya.

Basaria menuturkan, Irvan bersama sejumlah pihak diduga telah meminta, menerima, dan memotong pembayaran terkait dengan DAK tahun 2018 sebesar-besarnya 14,5% dari total Rp 46,8 miliar. Taufik dan Rudiansyah (pengurus MKKS Cianjur) diduga berperan sebagai penagih *fee* dari 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

“Sandi yang digunakan adalah “Cempaka” yang diduga merupakan kode menunjuk ke IRM (Bupati Cianjur). Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 1.556.700.000 miliar dalam pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, dan Rp 20.000,” tuturnya.

Sejauh ini, KPK menetapkan status tersangka kepada empat orang, yaitu Irvan, Cepy Sethiady (kakak ipar bupati). “Pasal yang disangkakan terhadap keempatnya adalah Pasal 12 huruf f atau e atau

pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” katanya.

Sementara kini Tubagus berstatus buron dan diminta supaya segera menyerahkan diri ke KPK. “Terhadap TCS, kami imbau untuk datang ke KPK dan menyerahkan diri sesegera mungkin begitu mendapatkan informasi ini. Sikap kooperatif dalam proses hukum akan sangat kami hargai,” ujarnya.

Basaria mengungkapkan, Tubagus merupakan orang kepercayaan bupati yang juga berperan dalam kasus serupa pada masa pemerintahan Tjetjep Muchtar Soleh, ayah kandung Irvan. “Dalam kasus ini, yang bersangkutan menjadi perantara dalam transaksi. Kenapa dia bisa jadi perantara ? karena para kepala sekolah percaya bahwa dia adalah orang kepercayaan bupati. Tidak hanya pada saat ini, tapi sudah terjadi sejak periode bupati sebelumnya,” ujarnya.

TERPANTAU SEPI

Setelah operasi tangkap tangan. Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan dan pendopo Kabupaten Cianjur terpantau sepi. Sejumlah orang yang ditemui “PR” mengaku tak tahu menahu ihwal penangkapan Bupati Irvan Rivano Muchtar dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rabu (12/12/2018) subuh.

Namun, berdasarkan informasi, sang bupati ditangkap lantaran diduga menerima suap dari para kepala sekolah yang tergabung ke dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Penyidik KPK disebut-sebut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Berdasarkan pantauan, sejak pagi hingga siang, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sepi, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ruangan Kepala Dinas Cecep Sobandi yang berada di lantai 2 dalam kondisi terkunci. Demikian pula halnya dengan ruangan Kepala Bidang SMP Rosidin. Bahkan, lampu di ruangan itu masih menyala.

Di ruang Bidang SMP, sejumlah staff tengah berbincang. Namun, begitu menyadari kehadiran awak media, mereka langsung terdiam. *Kawas gaang katincak*. Salah seorang staff mengungkapkan sang kepala bidang tak terlihat sejak pagi tadi. Asep Saepurohman, sekretariat dinas itu, mengatakan bahwa sejumlah orang memang mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Ada lima orang tidak dikenal datang. (Mereka) membawa kunci ruangan kepala dinas dan Kepala Bidang SMP,” katanya. Ia menambahkan, lima orang itu terdiri atas 4 pria dan 1 wanita.

Meskipun demikian, ia mengaku belum dapat memastikan, siapa sesungguhnya kelima orang itu. Asep pun tak dapat menyimpulkan apakah ke lima orang itu merupakan anggota tim KPK atau justru preman yang bertindak kriminal terhadap dua pejabat di dinas tersebut. “Saya Cuma dapat informasi dari beberapa staf di kantor soal kedatangan mereka. Intinya, kelimanya datang pagi-pagi ke ruangan tadi,” ucapnya.

Asep pun mengakui tak tahu menahu ihwal berita tentang penangkapan dua pejabat dinas itu oleh tim KPK. Demikian pula, ia tak paham soal kasus yang menjerat mereka. Hanya ia menyatakan, dua pejabat itu memang sudah tak terlihat sejak pagi. Mereka pun tak bisa dihubungi. “Saya masih berkoordinasi dengan staf terkait dengan masalah ini. Untuk lebih pastinya, nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Hal senada dinyatakan oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Cianjur Gagan Ruscanda. Ia bahkan mengaku tak tahu keberadaan bupati karena kemarin orang nomor satu di Kabupaten Cianjur itu memang tak memiliki agenda khusus. “Saya belum mendapat informasi dan sekarang tidak tahu bupati sedang berada di mana. Soalnya, tidak ada agenda hari ini,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, tak ada pejabat teras Kabupaten Cianjur yang memberikan pernyataan terkait dengan operasi tangkap tangan tersebut. Wakil Bupati Herman Suherman tidak dapat ditemui, tidak pula dapat dihubungi karena nomor telefonnya tidak aktif. Sekretariat Daerah Aban Subandi enggan menjawab panggilan telepon. Sementara Ketua DPRD Yadi Mulyadi hanya menjawab singkat ketika ditanya soal itu. “Saya baru tahu informasi OTT dari berita, masih perlu *cross check* tenatng kebenarannya. Belum ada komentar ya,” katanya.

TIDAK DIAM

Komentar pedas justru datang dari Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh), lembaga swadaya masyarakat yang kerap mengkritik pemerintahan Irvan Rivano Muchtar. “Akhirnya, ketidakpercayaan masyarakat Cianjur terhadap KPK dalam mengusut tuntas dugaan praktik korupsi di bumi santri dibayar lunas oleh tim senyap KPK. OTT ini membuktikan bahwa KPK tidak diam terhadap isu korupsi di Cianjur,” ujar Ketua Presidium Ampuh, Yana Nurzaman.

Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan Cianjur dari tindakan-tindakan korupsi, oleh karena itu, ia menganggap penangkapan bupati dan sejumlah pejabat itu merupakan hadiah menjelang pergantian tahun anggaran.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan tim KPK. Diharapkan pengungkapan kasus itu akan menambah semangat pegiat anti korupsi di Cianjur untuk memerangi tindakan menyimpang tersebut,” tuturnya. Tak hanya itu, ternyata penangkapan Bupati Cianjur menginspirasi seorang sopir angkot untuk meluapkan euforia. Salah satu angkot 05 (melayani jalur Terminal Rawabango-Jalan Halte Maleber-Jalan KH Opo Mustofa-Jalan Didi Prawirakusumah-Jalan Prof Moch Yamin-Jalan Raya Bandung-Rawabango), kemarin, menggratiskan ongkos perjalanan.

Banyak foto beredar, di dalam angkot, terpasang kertas bertuliskan “Naik angkot gratis hari ini, bonus OTT KPK”. Salah seorang warga, Putri (27), mengaku hanya melihat sekilas angkot yang dimaksud. Meski tidak menumpanginya, ia memastikan bahwa angkot itu dipenuhi penumpang. “Tidak jelas benar waktu lewat, angkot yang katanya digratiskan itu lumayan penuh,” ujarnya. (Ira Vera Tika, Shofira Hanan)

Berikut ini adalah berita yang menjadi objek analisis framing yang ditulis di media on line Kompas.com (Halim, 2018).

JAKARTA.KOMPAS.com - Kepala daerah kembali menjadi sasaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 12 Desember 2018

Kepala daerah yang dituduh adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Selain Irvan, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin, dan Tubagus Cepy Setiady yang merupakan kakak ipar Irvan.

Berikut fakta-fakta soal kasus tersebut.

1. OTT Dimulai Sejak Dini Hari

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, informasi mengenai adanya aliran uang kepada bupati telah diterima sejak 30 Agustus 2018. KPK kemudian menemukan petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi, pada Rabu dini hari. Menurut Basaria, pada pukul 05.00 WIB, teridentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Setelah itu, petugas KPK menangkap Cecep dan sopir di halaman Mesjid Agung Cianjur. Kemudian, pada pukul 05.12 WIB, petugas KPK menangkap Rosidin di kediamannya. Sekitar pukul 05.37 WIB, petugas KPK bergerak ke kediaman Taufik Setiawan alias Opik yang merupakan bendahara majelis kerja kepala sekolah (MKKS). Kemudian, ke kediaman Rudiansyah yang merupakan Ketua MKKS.

Setelah keduanya ditangkap, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi pendopo bupati dan menangkap Bupati Irvan Rivano Muchtar. Menurut Basaria, pada siang hari, sekitar pukul 12.05 WIB, tim KPK menangkap Budiman selaku kepala seksi di sebuah hotel di Cipanas, Jawa Barat. Dari OTT tersebut, KPK berhasil menemukan uang sebesar Rp. 1,5 miliar. Uang tersebut diduga sebagai barang bukti suap untuk bupati.

2. Korupsi Dana Pendidikan

Irvan dan kepala dinas pendidikan serta dua orang lainnya diduga memotong dana pendidikan untuk 140 sekolah menengah pertama (SMP). “Dana alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas pendidikan justru dipangkas sejak awal dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur.” Ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta. Rabu (12/12/2018). Menurut Basaria, pada 2018, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan sebesar Rp. 46,8 miliar. Namun, KPK menduga bupati dan kepala dinas memotong DAK tersebut sekitar 14,5 persen. Padahal anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. Menurut Basaria, diduga *fee* untuk Irvan sebesar 7 persen dari nilai anggaran DAK.

3. Kode “Cempaka”

Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap dari pemotongan dana pendidikan tersebut. Sementara itu, Cepy, kakak ipar Bupati Cianjur, diduga bertindak sebagai perantara transaksi dari kepala sekolah kepada bupati. Menurut keterangan KPK, para kepala sekolah percaya bahwa Cepy adalah orang kepercayaan bupati. Kemudian KPK menduga ada kode khusus yang digunakan sejumlah tersangka saat berkomunikasi. Salah satunya adalah kode “cempaka”. “Sandi yang digunakan adalah cempaka, yang diduga kode yang merujuk pada Bupati IRM.” Ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

4. Korupsi Warisan

KPK menduga kasus korupsi pada dana pendidikan di Kabupaten Cianjur. Tidak hanya pada saat Bupati Irvan Rivano Muchtar menjabat. KPK menduga praktik serupa telah terjadi sejak bupati pada periode sebelumnya. Adapun bupati pada periode sebelumnya adalah Tjetjep Muchtar Soleh yang merupakan orang tua dari Irvan Rivano Muchtar. “Ini sudah terjadi pada periode sebelumnya, pada saat orang tuanya menjabat,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

5. Akhirnya Menyerah

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan. Tubagus Cepy Setiady, kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, telah menyerahkan diri ke KPK, Kamis (13/12/2018). “Siang ini, sekitar pukul 14.00 WIB, tersangka TCS, kaka ipar bupati, telah menyerahkan diri ke KPK,” ujar Febri melalui keterangan tertulis, Kamis.

6. Ditahan

KPK resmi menahan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin. Kamis (13/12/2018).

“Terhadap tiga tersangka lain yang telah melewati proses pemeriksaan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis. Ketiga tersangka tersebut ditahan di tempat yang berbeda. Bupati Cianjur Irvan ditahan di Rutan cabang KPK, yang berlokasi di belakang Gedung KPK, Jakarta Selatan. Sementara itu, Cecep Sobandi ditahan di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kavling C-1. Lalu, Rosidin ditahan di Rutan cabang KPK di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Untuk satu tersangka lainnya, Cepy yang merupakan kakak ipar Bupati Cianjur, baru saja menyerahkan diri ke KPK kemarin. Setelah ia menyerahkan diri, pemeriksaan langsung dilakukan kepada Cepy

Penulis : Devina Halim

Editor : Diamanty Meilana